

# ANALISA KESELARASAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2019 – 2023

Hikmatul Hasanah<sup>1</sup>, Rosliana<sup>1,2</sup>, Akbar Alfa<sup>2</sup>, Gerhana Adjie<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pusdatin Puanri, Indragiri Hilir

<sup>2</sup>SDGs Center, Universitas Islam Indragiri

<sup>3</sup>STIE Indragiri, Rengat

Email: [r.rosliana@gmail.com](mailto:r.rosliana@gmail.com) (korespondensi)

Received : 31 Maret 2019 ; Accepted : 1 April 2019

## Abstract

The Indonesian Government's commitment to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) is seen in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 59 of 2017 on the Implementation of SDGs Achievement which provides a mandate to integrate SDGs into the development agenda. At present Indragiri Hilir Regency is drafting a Regional Regulation Plan on the Subnational Mid-Term Development Plan. This study can be a reference in the preparation of the SDGs Regional Action Plan. The findings of this study are 18 Harmonized Indicators and 26 Proxy Indicators.

Keywords: SDGs, Subnational Mid-Term Development Plan, Indicators

## Abstrak

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terlihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang memberikan mandat untuk mengintegrasikan TPB kedalam agenda pembangunan. Saat ini Kabupaten Indragiri Hilir sedang menyusun Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kajian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB. Adapun temuan pada kajian ini adalah 18 Indikator Selaras dan 26 Indikator Proksi.

Kata kunci: TPB, RPJMD, Indikator

## 1. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang diterbitkan pada September 2015. TPB merupakan wujud komitmen seluruh negara-negara untuk melaksanakan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, yang menyatakan bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu adanya penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Seiring dengan hal tersebut, maka

sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung pencapaian TPB, maka perlu adanya penyelarasan antara indikator TPB dengan indikator pembangunan daerah yang tertuang dalam indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Setelah itu juga diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD).

Struktur penyusunan dokumen RPJMD mempedomani Permendagri 54 Tahun 2010, dimana secara makro hanya menjelaskan, tujuan, target dan indikator pembangunan daerah dan indikator program. Sedangkan dalam indikator TPB disusun lebih teknis,

rigid dan detail yang sebagian besar ditemukan pada Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perencanaan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun demikian, TPB sebagai program baru yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 yang merupakan program Pembangunan Berkelanjutan 2015–2030 belum merupakan mandatory bagi pemerintah daerah untuk mengadopsinya dalam Rencana Pembangunan baik Jangka Panjang maupun Jangka Menengah.

Walaupun demikian, peran pemerintah daerah dalam pencapaian agenda pembangunan global adalah sangat penting. Keterlibatan pembangunan daerah dapat dipandang sebagai bentuk keterlibatan pemerintah daerah mendukung keberhasilan pembangunan global secara bottom-up. Pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan, menganggarkan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang mendukung terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan global. Seluruh tujuan pembangunan global yang tertuang dalam TPB secara langsung dan tidak langsung memiliki keterkaitan dengan indikator-indikator pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan platform global untuk merancang rencana pembangunan daerah, sehingga pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah akan mendukung terhadap pencapaian pembangunan global.

Keterkaitan pembangunan daerah dengan pembangunan global ini, maka semakin urgen untuk menyelaraskan tujuan TPB dengan target indikator pembangunan daerah. Urgensi penyelarasan indikator TPB dengan RPJMD daerah kabupaten adalah agar target dan tujuan TPB sebagai tujuan pembangunan dunia dapat tergambar dalam kemajuan pembangunan daerah, yaitu untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan, memperbaiki manajemen air dan energi, pembangunan lingkungan hidup dan penciptaan perdamaian, kadilan dan kelembagaan yang tangguh. Kemajuan pembangunan itu akan dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar TPB yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Hukum, dan Pilar Lingkungan. Oleh sebab itu, indikator TPB pada setiap pilar, target dan tujuan TPB harus selaras dengan indikator dan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan Analisis

Keselarasan Indikator TPB dengan Indikator Rancangan Peraturan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Hasil kajian ini akan menjadi instrument pemantauan dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap pembangunan global yang dikelompokkan dalam pilar-pilar TPB.

Tujuan Analisis ini adalah untuk memperoleh informasi tingkat keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan daerah terhadap pembangunan global. Secara spesifik, tujuan analisis keselarasan indikator TPB dan indikator pembangunan Kabupaten Bengkalis ini adalah mengidentifikasi keselarasan indikator Kinerja Utama, Indikator Misi, dan Indikator Kinerja Kunci terhadap Indikator TPB.

Keluaran yang diharapkan dari Analisis Keselarasan Indikator TPB dengan Indikator Ranperda RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 ini adalah diperolehnya informasi keselarasan antara indikator Ranperda RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dengan Indikator TPB. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi utama dalam penyusunan RAD TPB kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Definisi TPB

TPB sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 Millenium Development Goals (MDGs) tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB menjadi sebanyak 6 Tujuan (meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan) [1].

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB jauh lebih ambisius bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan Tujuan tersebut hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “Zero Goal” [2]. Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (zero). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa

Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (zero). TPB juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB telah bertransformasi menjadi 241 Indikator [1;3;4].

TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

## 2.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB.

TPB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah TPB dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional

dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

TPB tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB sebagai

suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research) Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dalam dokumen Ranperda RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah data sasaran indikator pembangunan daerah dan program yang terdapat dalam dokumen Ranperda RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap indikator SDGs pada 4 (empat) pilar, 17 sasaran dan 169 target serta 220 indikator yang sudah terakomodasi dalam metadata serta indikator sasaran pembangunan maupun program pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

Analisis data yang akan dilakukan dalam mengukur tingkat keselarasan indikator SDGs dengan indikator Ranperda RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 akan ditentukan pada 2 (dua) kategori gradasi, yaitu:

- 1) Selaras (Similar/Matches) Indikator Ranperda RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 yang sesuai dengan indikator TPB yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator TPB,
- 2) Hampir sama (Proxy) yaitu indikator Ranperda RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator TPB.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran lebih jauh terhadap Ranperda RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 yang memiliki keselarasan dengan indikator TPB menurut pilar SDGs disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pilar sosial, terdapat 5 tujuan yaitu: Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 Kesehatan, Tujuan 4 Pendidikan berkualitas dan Tujuan 5 Kesenjangan Gender. Ditemukan sebanyak 7 Indikator Selaras dan 9 Indikator Proksi.

- 2) Pilar ekonomi, terdapat 6 Tujuan yaitu: Tujuan 7 Energi, Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, Tujuan 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi, Tujuan 10. Berukrangnya Kesenjangan dan Tujuan 17 Kemitraan. Ditemukan sebanyak 5 Indikator Selaras dan 9 Indikator Proksi
- 3) Pilar lingkungan, terdapat 6 Tujuan yaitu: Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi, Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkeanjutan, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi bertanggung jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan. Ditemukan sebanyak 2 Indikator Selaras dan 6 Indikator Proksi
- 4) Pilar hukum dan tata kelola, Pilar ini terdapat 1 tujuan yaitu Tujuan 16. Ditemukan sebanyak 4 Indikator Selaras dan 2 Indikator Proksi

Sesuai dengan uraian sasaran pokok pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, maka ditemukan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir lebih fokus pada pembangunan Sosial dan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pendukung pada pencapaian keberhasilan pembangunan. Inovasi yang ditonjolkan yaitu Program Alokasi Dana Desa plus Kelurahan yang mendukung pencapaian tujuan 10. Khusus pilar Lingkungan yang ditonjolkan adalah tujuan 6 terkait Sanitasi dan Air bersih yang menjadi permasalahan karena faktor geografis. Indikator TPB tidak hanya diintegrasikan pada RPJMD saja, namun juga diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan turunan dari RPJMD yaitu Renstra OPD, Renja OPD dan RKPd. Pada tabel 1 berikut dijelaskan proporsi per Indikator.

Tabel 1. Sebaran Proporsi Perindikator

Pilar	Goals	Proporsi Per Indikator	
		Selaras	Proxy
Sosial	1. Tanpa Kemiskinan	1	3
	2. Tanpa Kelaparan	1	2
	3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2	0
	4. Pendidikan Berkualitas	2	1
	5. Kesenjangan Gender	1	3
	Sub Total	7	9
	7. Energi Bersih & Terjangkau	0	1

Pilar	Goals	Proporsi Per Indikator	
		Selaras	Proxy
	8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	2	4
	9. Industri, Inovasi, & Infrastruktur	3	1
	10. Berkurangnya Kesenjangan	0	1
	17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	0	2
	Sub Total	5	9
Lingkungan	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	1
	11. Kota & Permukiman yang Berkelanjutan	0	3
	12. Konsumsi & Produksi Bertanggungjawab	0	0
	13. Penanganan Perubahan Iklim	0	0
	14. Ekosistem Lautan	0	0
	15. Ekosistem Daratan	0	2
Sub Total	2	6	
Hukum dan Tata Kelola	16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	4	2
	Sub Total	4	2
Total		18	26

(Tpb/Sdgs) Dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hulu 2016 – 2021, Jurnal Selodang Mayang, Vol 4 No.3, 2018

[4] E. Deswanti, A.Zulfitri, Analisa Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi 2016 – 2021, Jurnal Selodang Mayang, Vol 4 No.3, 2018

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil kajian ini, Kabupaten Indragiri Hilir secara prinsip telah mengintegrasikan TPB ke dalam Indikator Ranperda RPJMD tahun 2018 – 2023 yang terdapat pada Indikator Kinerja Misi, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama. Adapun temuan pada kajian ini adalah 18 Indikator Selaras dan 26 Indikator Proksi. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi utama dalam penyusunan RAD TPB kabupaten Indragiri Hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappenas RI, Rencana Aksi Nasional SDGs Republik Indonesia 2016 – 2019 . [Dokumen Negara], 2016
- [2] UNDP dan UNEP, Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets. Case of Indonesia [Report], 2015
- [3] Afrida, I. Basyari, Analisa Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals

## LAMPIRAN

Indikator TPB	Indikator		Keterangan
Tujuan 1- Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun			
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat Kemiskinan (%)	IKU	Selaras
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	IKK	Proksi
1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan Yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya	Jumlah PMKS yang Tertangani (Jiwa)	IKU, Indikator Misi VI,IKK	Proksi
	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)	IKK	
1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Cakupan bantuan kepada masyarakat miskin (%)	Indikator Misi VII	Proksi
1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan (%)	IKK	Proksi
Tujuan 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	IKK	Proksi
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	IKK	Proksi
	Produksi beras (Ton)	IKK	Proksi
	Ketersediaan Pangan Utama (%)	IKK	Proksi
	Produksi Perikanan (Ton)	IKK	Proksi
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH (%)	IKU, Indikator Misi VIII	Selaras
	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	IKK	Proksi
Tujuan 3- Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia			
3.8.1 (a) Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Dasar Kesehatan (Puskesmas)	IKU	Selaras
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	IKK	Selaras
	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)		
	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)		
	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)		
	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)		
Tujuan 4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia			
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	APK SD/MI (%)	IKK	Selaras
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	APK SMP/MTs (%)	IKK	Selaras
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Indikator Misi IV,IKK,IKU	Proksi

Indikator TPB	Indikator		Keterangan
Tujuan 5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan			
5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Jumlah Pelayanan Penangan Kasus Perempuan dan Anak (Kasus)	IKU, Indikator Misi VI	Selaras
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indeks Pembangunan Gender (%)	IKK	Proksi
	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	IKK	Proksi
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Indeks Pembangunan Gender (%)	IKK	Proksi
	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	IKK	Proksi
5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	IKK	Proksi
	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	IKK	Proksi
Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta Pengembanganeloalan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua			
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase Rumah Tangga Yg Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Sumber Air Minum Layak (%)	IKU, Indikator Misi II,	Selaras
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	Indikator Misi II,	Selaras
6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Indeks kualitas air (indeks)	Indikator Misi III	Proksi
Tujuan 7 - Menjamin Akses Energi yang terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua			
7.1.1* Rasio Elektrifikasi	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	IKK	Proksi
Tujuan 8 - Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua			
8.1.1. Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Pertumbuhan Ekonomi (%)	IKU, Indikator Misi VIII	Selaras
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	IKK	
	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	IKK	
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	PDRB Per Tenaga Kerja (Rp Juta/Orang/Tahun)	IKU	Proksi
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	IKU,IKK	Proksi
8.3.1. (a) Persentase tenaga kerja formal	Tingkat kesempatan kerja (%)	IKU	Proksi
	Tenaga Kerja Terlatih (%)	Indikator misi VII	Proksi
8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	IKK	Proksi
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	PDRB sektor pariwisata (Rp juta)	Indikator Misi II	Selaras
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Kunjungan Wisatawan (Orang)	IKK	Proksi
Tujuan 9 - Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi			

Indikator TPB	Indikator		Keterangan
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU, Indikator Misi VIII	Proksi
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km)	IKU, Indikator Misi II,	Proksi
9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	Persentase Pelayanan Angkutan (%)	Indikator Misi III	Proksi
9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Konektivitas layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan (%)	Indikator Misi III	Selaras
Tujuan 10 - Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara			
10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri	Pertambahan Jumlah Desa Maju (Desa)	IKU	Proksi
Tujuan 11 - Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan			
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Luas wilayah terdampak bencana (Km2)	Indikator Misi VI,	Proksi
11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase pengelolaan dan penanganan sampah (%)	Indikator Misi III	Proksi
11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	IKK	Proksi
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi Pengembangangurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			
15.4.2 Indeks tutupan hijau pegunungan	Indeks tutupan lahan (indeks)	Indikator Misi III	Proksi
15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	IKK	Proksi
Tujuan 16 - Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan			
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Angka kriminalitas (Kejadian)	IKU, Indikator Misi VI, IKK	Proksi
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini BPK atas LKPD (Prediket)	IKU, Indikator Misi I, IKK	Selaras
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai AKIP (Prediket)	IKU, Indikator Misi I, IKK	Selaras
16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	IKU, Indikator Misi I, IKK	Selaras



Indikator TPB	Indikator		Keterangan
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	IKK	Selaras
	Kepemilikan KTP (%)	IKK	Selaras
	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	IKK	Selaras
16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Keterbukaan Informasi (%)	IKU, Indikator Misi I, IKK	Proksi
Tujuan 17 - Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan			
17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase Peningkatan PAD	IKK	Proksi
17.3.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari Total Anggaran domestik	Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)	IKU, Indikator Misi VIII	Proksi
	Nilai investasi PMA (Juta US\$)	IKU, Indikator Misi VIII	Proksi